PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Rabu Tanggal: 28 Juli 2010 Halaman: 5

Standarkan RAPBS, Disdik Adakan Bimtek

JOGJA— Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) pada tahun ajaran baru ini. Kebijakan ini dilakukan agar RAPBS yang dibuat sekolah terstandarisasi.

"Bimtek ini mengenai kebijakan anggaran untuk melihat arah sekolah, struktur atau aturan yang dipakai dalam penyusunan RAPBS," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori kepada wartawan di kantornya, Selasa (27/7).

Menurut Budi, sekolah harus menyusun RAPBS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Wajar), PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Walikota No. 21 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan RAPBS serta Perwal No. 107 tahun 2009 tentang Standar Harga Barang dan Jasa. Dengan demikian masyarakat tidak akan terbebani dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Bimtek ini sudah dilaksanakan di tingkat SMP dan SMA di Kota Jogja beberapa waktu lalu. Saat ini Disdik melakukan sosialisasi tata kelola di tingkat SD agar RAPBS yang disusun dibuat secara transparan, efektif, tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Target kinerja harus jelas dalam penyusunan RAPBS sehingga perlu analisis yang tepat, termasuk *data-base* sekolah dan batas RAPBS," ujarnya.

Mekanisme penyusunan RAPBS sendiri, lanjut Budi melalui tahap penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diajukan ke kepala sekolah. RAKS ini disampaikan ke komite sekolah untuk dijadikan dasar penyusunan APBS.

Dalam penyusunannya, sekolah terlebih dulu mendata tingkat kemampuan orangtua/wali murid siswa. Sehingga sekolah bisa merepresentasikan kepentingan siswa, termasuk keikutsertaan komite tidak tetap.

"Kami memberikan waktu dua bulan untuk menyusun APBS yang nantinya diajukan ke dinas untuk divaluasi," jelasnya.

Untuk meminimalisir penyimpangan, dinas juga membentuk tim evaluasi. Tim ini bertugas melakukan kontrol terhadap sekolah dalam penyusunan APBS."Temuan yang muncul akan diluruskan di tingkat sekolah," ujarnya. **(ptu)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 November 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005